JURNAL SIDANG MPR RI

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
DR. C. Rahimullah, SH., M.Si
PEMIMPIN UMUM
Drs. Eddie Siregar, M.Si
PEMIMPIN REDAKSI
M. Rizal
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Yana Indrawan
REDAKTUR PELAKSANA
Elis Murniaty, Suratno
KOORDINATOR REPORTASE
Rharas Esthining Palupi,
Adriansyah
REDAKTUR FOTO
Slamet Eko Suprayitno, Supriyanto
REPORTER
Euis Karmilah, Budi Muliawan,
Rosando, Sopiah,
Tengku Novan Muda Mulya,
Tri Hastuti, Rudy M. Gultom,
Jaka Sindu, Anggi Widia P
FOTOGRAFER
Ari Soeprapto, Sugeng,
Teddy Agusman, Wira,
Eka Hindra Sasmita, Supardy,
Mu'ammil Rokhily, Alief Ichwan,
Agung Sulistiono
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Syamsul Bahri
KOORDINATOR DISTRIBUSI
Elly Triani
STAF DISTRIBUSI
Hadi Anwar Sani, Jajuni, Kusnani
SEKRETARIS REDAKSI
Ati Oktafia, Tri Sulistianingsih,
Fatmawati, Yenita Revi

TIM AHLI
Syahril Chili, Johni Yasrul,
M. Husen, Rini S. Danudjaja,
Ardi Winangun, Suroso P. Adrianto,
Iman Firdaus, Derry Irawan,
Mustafa Helmy, Budi Sucahyono,
Nurul Huda, Mauludi Rachman,
Rianzi Gautama.

ALAMAT REDAKSI
Bagian Pemberitaan & Hubungan
Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta
Telp. (021) 57895050, 57895051
57895237, 57895238
Fax.. (021) 57895051, 57895237

MUKADIMAH

Menunggu Paket Pimpinan MPR RI 2009-2014

Menjelang pemilihan Ketua MPR RI Periode 2009-2014, tim sukses masing-masing calon ketua seolah-olah seperti *coach* atau pelatih sepakbola. Kesebelasan yang disusun apakah menggunakan formasi 4-4-2, 3-5-2, 2-4-4, atau formasi lainnya. Begitu juga komposisi pemainnya, siapakah yang dipasang sebagai ujung tombak, pemain sayap, dan penjaga gawang, semua tergantung pelatih.

Setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *judicial review* pasal 14 ayat 1 UU. No. 27 tahun 2009, maka konsekuensi dari pimpinan MPR tidak lagi berdasarkan perimbangan, 3 dari DPR dan 2 dari DPD, namun menjadi 'pasar bebas'. Sesaat j*udicial review* ini memberikan angin surga, namun setelah itu mereka menjadi ketar-ketir sendiri. Jabatan pimpinan dari unsur DPD yang seharusnya 2 bisa menjadi hanya 1 bahkan bisa jadi 0.

Adanya kebebasan perimbangan ini, dikatakan Sekjen PDIP Pramono Anung. Koalisi yang dibangun partainya untuk mengusung Taufiq Kiemas sebagai calon Ketua MPR, bisa tetap menggunakan formasi 3-2, 3 dari DPR dan 2 dari DPD; Bisa juga dengan menggunakan formasi 4-1, 4 dari DPR dan 1 dari DPD. Meski demikian Pramono mengatakan tidak akan menerapkan pola 5-0, yang keseluruhan pimpinan dari DPR.

Bila demikian apakah sistem paket pada pemilihan Ketua MPR Periode 2004-2009 lebih adil? Mungkin saja sebab pada saat itu paket calon pimpinan MPR yang terdiri dari 4 orang, masing-masing unsur pembentuk MPR, DPD dan DPR, diberi jatah sama, 2 orang.

Paket yang ada saat itu adalah Koalisi Kebangsaan atau Paket A, yang terdiri dari Sutjipto (FPDIP) sebagai ketua MPR dan Theo L Sambuaga (FPG), Sarwono Kusumaatmadja (DPD), dan Aida Ismeth (DPD). Satunya lagi Koalisi Kerakyatan atau Paket B, yang diusung FPKS, FPD, FPAN, FKB, FPP, dan FBPD yang terdiri dari Hidayat Nur Wahid (FPKS), AM Fatwa (FPAN), Aksa Mahmud (DPD), dan Mooryati Soedibyo (DPD).

Saat ini secara kalkulasi atau hitung-hitungan di atas kertas, jumlah anggota DPD sebanyak 132 orang dan anggota DPR sebanyak 560 orang, besar kemungkinan Ketua MPR Periode 2009-2014 akan direbut dari anggota DPR. Ini bisa terjadi karena dominasi jumlah anggota DPR. Dan dilihat secara hitung-hitungan sepertinya DPD hanya sebagai penambah suara. Bila partai politik semacam PKB-PPP-PDIP-Golkar-Demokrat membentuk koalisi, suaranya sudah cukup untuk memenangi pemilihan Ketua MPR. Bila mengikuti hitungan-hitungan seperti itu, maka pemilihan Ketua MPR selesai sudah.

Namun dunia politik terkadang tidak pasti, bisa berubah setiap saat. Selain itu, PKS mengusung calonnya sendiri, Hidayat Nur Wahid. Sementara Partai Gerindra dan Partai Hanura, sampai tulisan ini diturunkan, belum menentukan sikapnya siapa calon yang

JURNAL SIDANG MPR-RI

EDITORIAL **Hal.**

- Kepemimpinan Orang Muda..... 2.

LAPORAN UTAMA

- Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR Berlangsung Khidmat..... 3.

LIPUTAN

- Anas Urbaningrum: Ke Depan Peran MPR Masih Penting..... 4.
- Pelantikan Anggota MPR RI Diwarnai Hujan Interupsi..... 4.
- Pemilihan Ketua MPR Tidak Akan Sealot DPD..... 4.
- Ginandjar Pastikan Maju, Demokrat Dukung Taufik Kiemas..... 5.
- Irman Gusman, Ketua DPD 2009-2014..... 6.
- DPR: 15 Komisi dan 6 Badan..... 7.
- Usulan Amandemen Kelima UUD 45 Jangan Ubah Sistem Presidensial..... 8.
- Jadi Lokomotif Perbaikan Citra..... 8.
- Batik Warisan Budaya Indonesia..... 9.
- Dedi " Miing" Gumelar Ingin Mereformasi Birokrasi..... 10.
- Taufik Kiemas Memang Sudah Saatnya Muncul..... 11.

SERBA SERBI

- Aksi Sniper..... 12.
- Nitip Interupsi Buat Mahkamah Konstitusi..... 12.

TOKOH HARI INI

- Gandung Pardiman, Bintang Interupsi..... 13.
- Mardivun Sadipun Komber..... 13.

PENASEHAT Pimpinan MPR-RI, **PENANGGUNG JAWAB** DR. C. Rahimullah, SH., M.Si, **PEMIMPIN UMUM** Drs. Eddie Siregar, M.Si **PEMIMPIN REDAKSI** M. Rizal, **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI** Yana Indrawan **REDAKTUR PELAKSANA** Elis Murniaty, Suratno **KOORDINATOR REPORTASE** Rharas Esthining Palupi, Adriansyah, **REDAKTUR FOTO** Slamet Eko Suprayitno, Supriyanto **REPORTER** Euis Karmilah, Budi Muliawan, Rosando, Sopiah, Tengku Novan Muda Mulya, Tri Hastuti, Rudi M. Gultom, Jaka Sindu, Anggi Widia P, Suwarni, Bayu Setiadi, Suci Ati, Muammil Rokhily, Sugeng Irianto, Nita Juwita, Dian Arivani **FOTOGRAFER** Ari Soeprapto, Sugeng, Teddy Agusman, Wira, Eka Hindra Sasmita, Supardy, Iwan, Agung Sulistiono **PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI** Syamsul Bahri **KOORDINATOR DISTRIBUSI** Elly Triani **STAF DISTRIBUSI** Hadi Anwar Sani, Jajuni, Kusnani **SEKRETARIS REDAKSI** Ati Oktafia, Tri Sulistianingsih, Fatmawati, Yenita Revi **TIM AHLI** Syahril Chili, Johni Yasrul, M. Husen, Rini S. Danudjaja, Ardi Winangun, Suroso P. Adrianto, Iman Firdaus, Derry Irawan, Mustafa Helmy, Budi Sucahyono, Nurul Huda, Mauludi Rachman, Rianzi Gautama. **ALAMAT REDAKSI** Bagian Pemberitaan & Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, JakartaTelp. (021) 57895050, 57895051, 57895237, 57895238 Fax. (021) 57895051, 57895237

Kepemimpinan Orang Muda

Tahun 2009 ini mungkin menjadi tanda kebangkitan pemimpin muda. Hal ini bisa dilihat dari dominasi kaum muda di DPR dengan tampilnya Marzuki Alie (Demokrat), Priyo Budi Santoso(Golkar), Pramono Anung (PDIP), Marwoto Mitrohardjono, dan Anis Matta (PKS). Di jajaran DPD juga muncul kaum 'muda' Irman Gusman, La Ode Ida, dan GKR Hemas. Begitu juga nanti di MPR jika paket Taufiq Kiemas diterima. Ada nama-nama Hajriyanto Yasin Thohari, Lukman Hakim Saifuddin, dan mungkin nama baru dari PKB dan sosok dari DPD.

Dari nama-nama ini yang terhitung sepuh hanyalah H. Taufiq Kiemas yang berusia hampir 67 tahun dan Marwoto Mitrohardjono, 65 tahun. Untuk tokoh yang berusia di bawah 60 tahun dan di atas 50 tahun adalah Marzuki Alie, 54 tahun dan GKR Hemas, 57 tahun. Sementara selebihnya mereka adalah kalangan muda yang masih berusia di bawah 50 tahun.

Sebut saja nama Ketua DPD H. Irman Gusman, S.E., MBA. Pria pengusaha yang dikenal sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah ini, lahir di Padang Panjang pada 11 Februari 1962. Artinya, Irman masih 47 tahun. Lulusan Master of Businees Administration dari University of Bridgeport, Connecticut, AS itu sebelumnya pernah menjabat wakil ketua DPD. Pimpinan DPD yang lain adalah La Ode Ida. Peneliti yang masih berusia 48 tahun ini dilahirkan di Tobea, 12 Maret 1961.

Kemudian di jajaran pimpinan DPR, muncul nama Pramono Anung Wibowo. Sekjen PDIP ini merupakan orang nomor dua di partai berlambang Banteng. Pramono, sarjana ITB 1988 ini dilahirkan di Kediri, Jawa Timur, tahun 1963. Artinya, kini ia masih berusia 46 tahun.

Kemudian disusul tokoh Partai Beringin, Priyo Budi Santoso. Pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur, pada 30 Maret 1966. Priyo masih berusia 46 tahun. Bahkan, Priyo tercatat sebagai ketua FPG termuda sepanjang sejarah. "Dengan memberi peluang kepada 40 persen calon legislatif (caleg) muda, berarti Partai Golkar memang memberikan kepercayaan yang cukup besar kepada generasi belia. Bahkan kelihatannya, para senior di Partai Golkar sudah mulai menyodorkan tongkat estafet kepada para juniornya," katanya. Wajah muda lain adalah Anis Matta. Sekjen PKS ini ternyata masih berisia 41 tahun.

Sementara nama lain yang direncanakan akan memimpin MPR priode 2009-2014 ini adalah Hajriyanto Yasin Tohari. Hajriyanto masih berusia 49 tahun dan tanpak sangat cekatan. Begitu juga mantan putera Menteri Agama tahun 1960-an K.H. Saifuddin Zuhri, Lukman Hakim Saifuddin yang masih berusia di bawah 50 tahun.

Kemunculan tokoh-tokoh muda ini tentu saja membanggakan kita semua. Sebab, kalangan tua sudah mulai menyadari perlunya regenerasi. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berhasil melahirkan pengganti. Jika dilihat dari prestasi dan pengalaman mereka di majelis dan di dewan selama ini, mereka tak bisa dilihat sebelah mata. Mereka adalah orang-orang cerdas yang berani menyuarakan kebenaran. Diperkirakan ada 60% lebih kalangan muda yang mengisi parlemen kita sejak tahun ini.

Karena itu, keberanian menampilkan kalangan muda jangan hanya terbatas di lembaga MPR, DPR, dan DPD saja. Kemunculan mereka di MPR, DPR, dan DPD diharap menjadi pemicu tampilnya kalangan muda di kabinet dan jabatan-jabatan eksekutif lainnya.

Bagamainapun, kalangan muda adalah kalangan yang berenergi. Memiliki ide-i-de brilian karena masih segar. Namun, kadangkala bisa kebablasan. Karena itu diperlukan orang tua untuk mengarahkan dan mengontrol. Potret kepemimpinan di DPR dan DPD -juga MPR mendatang- mencerminkan itu; adanya panutan dan sosok bijak kalangan tua dan tenaga dinamis dan kreatif kaum muda yang akan melahirkan kepemimpinan yang ideal.(MH)

Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR Berlangsung Khidmat

Jurnal MPR (03/10). Pengucapan sumpah dan janji anggota MPR RI periode 2009-2014 di Ruang Nusantara Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Jumat (2/10) pagi, berjalan lancar dan khidmat. Namun setelah acara pokok pengucapan sumpah dan janji anggota MPR itu, rapat paripurna MPR yang dipimpin Ketua sementara MPR yaitu Marzuki Alie (Ketua DPR) dan Irman Gusman (Ketua DPD) diwarnai interupsi.

Acara pengucapan sumpah dan janji anggota MPR dimulai pukul 9.40 WIB. Rencana semula, pengucapan sumpah dan janji anggota MPR periode 2009-2014 dilakukan pada Kamis malam (1/10) pukul 22.00 WIB. Namun, sampai pukul 24.00 WIB, rapat paripurna DPD yang mengagendakan penetapan pimpinan DPD belum selesai, sehingga pengucapan sumpah dan janji anggota MPR diundur menjadi Jumat pagi.

Pada pukul 9.40 WIB, Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla memasuki ruang sidang paripurna MPR didampingi Ketua dan Wakil Ketua Sementara MPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghadiri acara ini karena masih berada di Sumatera Barat. Sidang paripurna diikuti seluruh anggota MPR dari unsur DPR dan DPD. Tampak hadir pula Ketua MK Mahfud M.D, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Menteri Agama Maftuh Basuni, dan perwakilan negara-negara sahabat.

Setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta yang dipimpin Ketua Sementara MPR Marzuki Alie, dilanjutkan dengan acara utama pengucapan sumpah dan janji anggota MPR. Ketua MA Harifin Tumpa memandu pengucapan sumpah dan janji. Kemudian masing-masing perwakilan kelompok secara simbolis menandatangani berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota MPR periode 2009-2014. Anggota MPR pun menandatangani berita acara yang sudah disiapkan di meja masing-masing.

Sebagai bekal untuk menjalankan tugas ke-MPR-an, Pimpinan MPR Periode 2004-2009 yakni Hidayat Nur Wahid didampingi A.M. Fatwa, Aksa Mahmud dan Mooryati Soedibyo menyerahkan laporan kinerja dan rancangan tata tertib MPR periode 2004-2009 kepada pimpinan sementara MPR. Saat menginjak acara tersebut, mulai terdengar interupsi.

Usai penyerahan laporan kinerja MPR dan rancanan tata tertib, interupsi kembali terdengar. Interupsi diantaranya dari Akbar Faisal (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat) yang mempertanyakan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Interupsi Pak Ketua. Mengapa dalam acara sakral seperti ini tidak dihadiri oleh Presiden," kata Gandung Gandung Pardiman, anggota MPR RI dari Partai Golkar.

Panda Nababan dari F-PDI Perjuangan juga melakukan interupsi yang menegaskan agar ketidakhadiran jangan menjadi preseden di masa datang. Ada juga interupsi dari salah satu anggota Fraksi Partai Gerindra yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah bekerjasama dengan Presiden SBY selama lima tahun. Ucapan terima kasih tersebut disambut tepuk tangan meriah dari seluruh anggota MPR. Jusuf Kalla terlihat tersenyum.

Sementara masih terdengar interupsi dari anggota lainnya, namun Ketua sementara MPR RI Marzuki Alie tetap menjalankan sidang. Rangkaian acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni. Setelah menyanyikan kembali lagu Kebangsaan Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla meninggalkan ruang sidang paripurna Nusantara didampingi Ketua dan Wakil Ketua Sementara MPR. (Budi Sucahyo)

Anas Urbaningrum
Ke Depan Peran MPR Masih Penting

Jurnal MPR (03/10). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih mempunyai peran yang sangat penting. Walau tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, peran MPR masih dibutuhkan dan itu sesuai dengan amanat kontitusi. "Yang paling penting sekarang bagaimana kinerja MPR yang baik itu perlu ditingkatkan," ungkap anggota MPR yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat/DPR, Anas Urbaningrum.

Bagi Anas wewenang sudah sangat jelas diatur oleh Undang-Undang yang tidak bisa digantikan lembaga lain, seperti DPR maupun DPD. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya peran MPR mempunyai peran yang sangat signifikan. "Bagi saya hal-hal yang signifikan itu misalnya tentang melantik presiden dan wakil presiden, menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Dan ini jelas peran yang saya kira sangat penting," ucapnya.

Keduanya juga menampik anggapan tidak sedap tentang MPR. Lukman melihat bahwa orang yang mengatakan peran MPR hanya sebatas seremonial belaka adalah salah. Baginya, orang seperti itu jelas tidak paham tentang sistem ketatanegaraan. "Tugas dan wewenang MPR sangat jelas diatur dalam Undang-Undang. Begitu juga tentang jumlah ketuanya," ujar Lukman. (Huda)

Pelantikan Anggota MPR RI Diwarnai Hujan Interupsi

Jurnal MPR (03/10). Hujan interupsi terjadi pada acara Pengucapan Sumpah/ Janji anggota MPR RI periode 2009-2014 di Gedung Nusantara, Jum'at pagi (02/10). Dimulai oleh lag-lagi Roy Suryo, anggota MPR dari Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY), minta panitia disiplin waktu, karena undangan pukul 09.00, tapi hingga pukul 09.00 lewat acara belum dimulai.

Tak lama kemudian acara dibuka oleh Marzuki Alie selaku Ketua MPR RI sementara didampingi Irman Gusman. Sesuai ketentuan, pimpinan MPR sementara adalah Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI. Karena itulah Marzuki dan Irman, masing-masing Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, duduk di kursi pimpinan MPR sementara tersebut.

Awalnya Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR RI berlangsung khidmat. Acara dimulai dengan Pembacaan Keputusan Presiden tentang Peresmian Keanggotaan MPR RI yang disampaikan oleh Sesjen MPR RI Rahimullah.

Sampai dengan penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji Anggota MPR acara berlangsung khidmat. Namun, pada saat penyerahan memori jabatan Pimpinan MPR periode 2004 – 2009 kepada Pimpinan MPR sementara interupsi pun mulai terdengar.

"Interupsi ketua.. interupsi ketua..", tapi Marzuki tak menghiraukan dan tetap meneruskan acara tersebut. Setelah penyerahan memori rampung, anggota yang melakukan interupsi yang kemudian diketahui bernama Gandung Pardiman, nomor anggota A-232 itu berasal dari Partai Golkar mewakili Jogjakarta.

Namun Ketua MPR sementara Marzukie Alie tidak menghiraukan interupsi tersebut, dan tetap meneruskan jalannya penyerahan memori.

Begitu penyerahan memori berakhir, Gandung kembali mengangkat tangannya: "Interupsi ketua...." Marzuki pun memberi kesempatan ia bicara. "Pak ketua, kenapa pada acara sakral setiap lima tahun sekali ini Presiden tidak hadir. Presiden seharusnya memberi alasan ketidakhadirannya agar masyarakat mengetahui..," katanya.

Pertanyaan Gandung itu langsung dijawab oleh Marzuki: "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru tiba di luar negeri pukul 11.00 kemarin (Kamis (1/10), red), dan begitu mendapat laporan telah bencana, beliau langsung terbang ke Sumatera Barat. Presiden menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya pada acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR dan DPD RI."

Pemilihan Ketua MPR Tidak Akan Sealot DPD

Jurnal MPR (3/9). Pemilihan Ketua MPR yang berlangsung hari ini, Sabtu (3/10) diperkirakan tidak akan sealot pemilihan Ketua DPD seperti pada Kamis, (1/10). "Saya kira tidak akan lama," kata Wakil Ketua DPD La Ode Ida. Sebab, dalam pemilihan ketua MPR sudah ada beberapa paket calon yang sudah disiapkan dan diusung oleh beberapa fraksi yang ada. Pemilihan juga diperkirakan hanya satu putaran.

Sedangkan dalam pemilihan ketua DPD harus mewakili unsur kepulauan dan wilayah, sehingga menyebabkan pemilihan berlangsung dua putaran. Nama-nama calon yang bakal diusung antara lain Taufiq Kiemas, Hidayat Nur Wahid, dan Ginandjar Kartasasmita untuk ketua. Sementara untuk wakil ketua muncul nama Hajriyanto Yasin Thohari, Lukman Hakim Saifuddin, dan satu orang dari PKB yang belum diputuskan.(Iman Firdaus).

Bursa Calon Pimpinan MPR RI
Ginandjar Pastikan Maju, Demokrat Dukung Taufik Kiemas

Jurnal MPR (03/10). Bursa pencalonan Pimpinan MPR RI periode 2009-2014 kian memanas. Pasca turunnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pasal 14 Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kini, DPD berpeluang untuk menduduki kursi Ketua MPR.

"Saya kira putusan itu baik, memberikan keadilan sesuai dengan konstitusi. Buat DPD tentu ada tantangannya. Dengan dibuka kesempatan itu, DPD harus berusaha merebut kursi ketua MPR. Kalau tidak buat apa kita mengajukan *judicial review*," kata Ketua DPD periode 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita, sesaat sebelum melanjutkan sidang pemilihan pimpinan DPD, Kamis (1/10) malam.

Meski hingga kini, DPD belum final memutuskan siapa kira-kira yang akan diajukan menjadi calon ketua MPR, Ginandjar memastikan diri untuk maju dalam bursa pencalonan. "Ya, kalau saya pasti bersedia. Saya berusaha menggalang dukungan sambil menunggu hasil rapat,"ujarnya.

Sementara itu, Partai Demokrat memastikan tetap mendukung Taufik Kiemas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sejauh ini Partai Demokrat telah lama melakukan lobi, baik dengan partai koalisi dan partai non koalisi. Dalam hal ini Golkar dan PDIP.

"Memang komunikasi yang baik selama ini dengan PDIP sedang kita lihat untuk semangat kebersamaan. Kita kan selalu berangkat dari semangat kebersamaan. Bahkan Pak SBY menyatakan, menangnya Partai Demokrat adalah menangnya rakyat Indonesia. Karena itu ya apa salahnya kita mendukung PDIP," ungkap anggota DPR dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul seusai pengambilan sumpah/janji anggota MPR RI periode 2009-2014 di Gedung Nusantara, MPR/DPR, Jakarta, Jumat (2/10).

Ruhut yang juga berprofesi sebagai pengacara ini menjelaskan, terkait soal pemerataan, sejauh ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang jadi salah satu mitra koalisinya sudah mendapat posisi di Wakil Ketua DPR. "Kemudian yang kami bisa dapat di Wakil Ketua MPR, kami kasih kepada PKB (Partai Kenagkitan Bangsa). Jadi, sudahlah, kami tidak meninggalkan koalisi. Semua kita beri kesempatan untuk duduk disitu,"tegasnya.

Presiden Prioritaskan Bencana

Menanggapi interupsi dari salah satu anggota MPR dari Partai Golkar, Gandung Pardiman yang mempertanyakan ketidakhadiran Presiden SBY dalam pengambilan sumpah/janji anggota MPR, Ruhut menyatakan, tidak melanggar kode etik. Presiden lebih memprioritaskan persoalan lain, karena situasi dan kondisi seperti bencana alam dan persoalan internasional.

Ia mengkritik cara Gandung saat menginterupsi yang mempermasalahkan ketidakhadiran presiden. "Jangan seperti apa yang dilakukan oleh saudara Gandung dari partai Golkar. Inilah kita berpolitik, 2 tambah 2 itu bukan 4. Saya sedih juga kalau kader Golkar begitu,"demikian Ruhut. (Rini S. Danudjaja)

DPD Dukung Penuh Ginandjar

Jurnal MPR (03/10). Anggota DPD dari daerah Sulawesi Tenggara Laode Ida mengatakan, DPD secara penuh mendukung Ginandjar Kartasasmita sebagai kandidat calon dalam perebutan kursi Ketua MPR.

Laode Ida menyatakan hal usai pelantikan Anggota MPR di Gedung Nusantara, Jum'at (2/10). "Sudah ada kesepakatan bahwa DPD mendukung penuh pencalonan Pak Ginandjar untuk memperebutkan Kursi Ketua MPR," tegas Laode yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD periode 2004-2009.

Lebih lanjut ia menambahkan, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan anggota DPD menduduki kursi Ketua MPR memberi peluang kepada setiap orang untuk ikut memperebutkan jabatan terebut.

"Putusan MK benar-benar membuat pencalonan pimpinan MPR seperti terjun bebas karena siapa saja bisa mencalonkan diri," kata Laode.

Mengenai komposisi kepemimpinan MPR, apakah 4 anggota DPR dan 1 DPD, atau 3 DPR dan 2 DPD. Jika komposisinya 4 DPR + 1 DPD, hal tersebut akan mengurangi makna kepemimpinan MPR sebagai simbol dari kepemimpinan dua lembaga yakni DPR dan DPD. "Saya berharap, DPD bisa mendapat jatah 2 dari 5 kursi pimpinan MPR," tegasnya.

Selain Ginandjar, DPD tengah menyiapkan 1 orang lagi untuk duduk sebagai salah satu pimpinan di MPR dan posisi 1 orang tersebut masih dibahas.

Juga hangat dibicarakan adalah pencalonan Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR RI. Ia didukung, selain oleh kader PDIP itu sendiri, juga mendapat dukungan dari partai pemenang pemilu, yakni Partai Golkar, partai Demokrat dan partai lainnya.

Menurut anggota DPR/MPR dari F-PDI Perjuangan, Pramono Anung, majunya Taufik Kiemas menjadi calon Ketua MPR atas dukungan penuh dari lapisan kader PDIP. "Beliau maju bukan karena meminta jabatan, tapi karena dukungan dari partai," tegasnya.

Dikesempatan ini, Pramono Anung juga menjelaskan, yang menjadi persoalan bukan lagi Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR. tapi bagaimana keputusan ini bisa diselenggarakan secara aklamasi atau tidak. "Kalau ada calon lain tentunya tidak bisa aklamasi,"ujarnya.

Persolaan itu, tambah Pramono Anung, akan dibicarakan lebih lanjut melalui forum pertemuan pimpinan DPR dan DPD. Apakah akan menggunakan sistem paket atau pengajuannya sesuai dengan keputusan MK.

Persoalan lainnya, ungkap Pramono Anung, adalah mengenai komposisi apakah 4 anggota DPR 1 anggota DPD atau 3 anggota DPR dan 2 anggota DPD.

"Memang seyogyanya, komposisi yang dipakai akan menjadi lebih apik adalah perwakilan dari representasi dari DPR dan DPD secara seimbang. Nah itulah yang sekarang menjadi pemikiran apakah 3 berbanding 2 atau 4 berbanding 1, dan kemungkinan seperti itu akan dibahas dalam forum lobi dengan pimpinan DPD," jelasnya.

Ketika ditanya mengenai nama-nama yang sudah pasti dari DPR, ia menjawab bahwa yang sudah mengkerucut adalah Taufik Kiemas, Hajrianto Tohari dan Lukman Hakim Saefuddin dan satu nama lagi belum didiskusikan. Dan dari DPD ada dua nama yang diusulkan, Aksa Mahmud dan Djan Faridz.(nt)

Irman Gusman Ketua DPD 2009-2014

Jurnal MPR (03/10). Lewat pemilihan yang berlangsung alot, akhirnya senator asal Sumatera Barat Irman Gusman terpilih menjadi ketua DPD periode 2009-2014. Duduk sebagai wakil Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas (DI Jogjakarta) dan La Ode Ida (Sulawesi Tenggara). Di saat akan dilakukan pemilihan ketua, GKR Hemas memilih mundur dan mengalihkan suaranya ke Irman sehingga yang bertarung Irman dan Laode.

Pemilihan yang berlangsung dua putaran disaring berdasarkan gugus kepulauan dan wilayah. Irman dicalonkan dari gugus pulau Sumatera atau Barat. Hemas dari wilayah tengah dan La Ode Ida dari wilayah Timur. Pemilihan berlangsung alot hingga pukul 01.30 dinihari. Akibatnya, pengambilan sumpah/janji anggota MPR yang sedianya akan dilangsungkan pada pukul 22.00 malam itu juga, tidak jadi dilaksanakan dan diundur esok harinya, Jumat (2/10).

Proses pemilihan diselingi beberapa kali skorsing dan puluhan kali interupsi sehingga acara yang dibuka pada pukul 13.00 siang itu menyebabkan banyak anggota DPD yang kelelahan. Saat pemilihan putaran pertama usai, misalnya, ada anggota DPD yang minta waktu untuk istirahat. Namun permintaan ini ditolak oleh anggota lain dengan alasan sudah terlalu larut malam. Ada juga yang minta dibagikan makanan ringan (*snack*) ke dalam ruangan, juga ditolak oleh Sekjen DPD. Akibatnya, ada beberapa anggota yang ingin istirahat, keluar ruangan sendiri.

"Dengan persetujuan sidang DPD ke tiga ini menetapkan Irman Gusman sebagai Ketua DPD," kata Wakil Ketua DPD sementara Percha Leanpuri, dalam rapat paripurna DPD untuk pemilihan Ketua DPD, di Gedung Nusantara V DPD, Jakarta, Jumat (2/10). Selain itu, Percha juga menetapkan La Ode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai Wakil Ketua DPD. "Berdasarkan pasal 30 ayat 2 tentang pemilihan ketua DPD dimana yang memperoleh suara terbanyak akan menduduki sebagai Ketua DPD dan yang memperoleh suara terbanyak kedua akan menduduki wakil ketua," ujarnya.

Dari hasil pemilihan tahap tiga ini Irman memperoleh suara sebanyak 81 suara dan La Ode memperoleh suara sejumlah 46 suara. Karena Ratu Hemas telah menggundurkan diri sebagai pencalonan Ketua DPD, maka pada putaran ketiga Ratu Hemas tidak diikutsertakan. Setelah terpilih menjadi ketua Irman dikerubuti oleh anggota DPD lain untuk diberikan ucapan selamat. Esoknya, Jumat (2/10) Irman menjadi ketua sementara pimpinan MPR mendampingi Marzuki Alie (Ketua DPR dan Partai Demokrat) untuk memimpin upacara pengambilan sumpah/janji anggota MPR.

Irman Gusman resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009/2014 oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa, Jumat (2/9/2009) dini hari. Dalam pidato singkatnya, Irman berharap akan terbangun kerja sama yang erat di antara pimpinan DPD. "Mudah-mudahan dengan kerja sama kita yang baik, kita mampu membawa lembaga ini memperjuangkan aspirasi rakyat," ujarnya di Senayan, Jakarta.

Irman dikenal sebagai tokoh sukses dan hangat. Pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, 11 Februari 1962 itu pernah mengenyam pendidikan di AS dengan memperoleh gelar MBA.

Nama Irman sudah muncul bersama nama A.M. Fatwa dan La Ode Ida untuk kepemimpinan DPD. Misalnya, menjelang pemilihan Ketua DPD, suara dukungan mulai mengerucut. Dukungan atas pencalonan Irman Gusman dari wilayah timur diutarakan Mervin Sadipun Komber, anggota DPD Papua Barat. "Kami akan memilih ketua yang memikirkan persolan di Papua," ujarnya di Jalan Denpasar Raya C Nomor 3, Jakarta, Rabu, rumah dinas Irman.

Menurut Mervin, salah satu tokoh yang selama ini bersuara memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua adalah Irman Gusman. "Tentu Pak Irman akan mendorong dialog nasional. Ini bagi kami yang akan kita dukung," tandasnya.

Hal senada dikemukakan Abdul Aziz, anggota DPD Sumatera Selatan. "Di Sumatera beliau (Irman) bukan hanya putra terbaik, dari pengalamannya dia seorang solution maker," ungkapnya.

Menurut Abdul Aziz, anggota MPR periode 1999-2004 dari Fraksi Utusan Daerah ini mampu membantu dalam menjembatani penyelesaian masalah yang timbul di daerah dengan menjalin hubungan global. (Iman Firdaus)

DPR : 15 KOMISI DAN 6 BADAN

Jurnal MPR (03/10). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib mengenai Alat Kelengkapan DPR RI Periode 2009-2014 dan Pembentukan Peraturan DPR RI. Alat Kelengkapan DPR RI akan terdiri dari 15 komisi dan 6 Badan.

Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Pansus Rancangan Perubahan DPR RI tentang Tata Tertib Darul Siska dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Agung Laksono, Selasa (29/9), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Darul Siska menjelaskan, pengelompokkan tugas Komisi disesuaikan dengan kelompok kementerian yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Komisi di Bidang Politik Hukum dan Keamanan yaitu: Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Komisi V.

Komisi di Bidang Kesejateraan Rakyat: Komisi VI, Komisi VII, Komisi VIII, Komisi IX.

Komisi di Bidang Industri dan Perdagangan: Komisi X, Komisi XI, Komisi XII.

Komisi di Bidang Ekonomi dan Keuangan: Komisi XIII, Komisi XIV, Komisi XV.

Komisi I urusan Pemerintahan Bidang Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika, dengan mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI), Dewan Pers, Lembaga Informasi Nasional (LIN).

Komisi II urusan Pemerintahan Bidang Dalam Negeri dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan pertanahan nasional (BPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisi III urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan dengan mitra kerja Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Komisi IV urusan Pemerintahan Bidang Administrasi, Aparatur dan Pelayanan Pemerintahan, dengan mitra kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Negara, Lembaga Administrasi negara (LAN), Badan Kelembagaan Negara (BKN), Arsip Nasional, Komisi Ombudsman Nasional, Sekretariat Lembaga-Lembaga Negara RI (BPK, MA, MK, KY, DPD, MPR).

Komisi V urusan Pemerintahan Bidang HAM, Hukum dan Keamanan, dengan mitra kerja Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Komisi VI urusan Pemerintahan Bidang Agama dan Sosial, dengan mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian sosial, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf, Badan Pengurusan Haji.

Komisi VII urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan mitra kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi (BPPT), Badan tenaga atom Nasional (Batan), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan), Perpustakaan Nasional, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nasional (Bapeten), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Dewan Riset Nasional (DRN).

Komisi VIII urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan mitra kerja kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Narkotika Nasional.

Komisi IX urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, dengan mitra kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Komisi X urusan Pemerintahan Bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, dengan mitra kerja Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Kementerian Negera Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (KPM), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Komisi XI urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Wisata, dan Informatika, dengan mitra kerja Kementerian Perhubungan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Komisi XII urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, dengan mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Komisi XIII urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan, dengan mitra kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan/ Kepala BAPPENAS, Bank Indonesia, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Komisi XIV urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan, Energi, Lingkungan Hidup, dengan mitra Kerja Kementerian Pertambangan dan Energi, Kementerian Lingkungan hidup, Dewan Energi Nasional, BP Migas, BPH Migas.

Komisi XV urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, dengan kitra kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim.

Selain itu, Alat kelengkapan Dewan DPR RI terdiri dari Komisi, Badan Lagislatif, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Urusan Rumah Tangga.

Darul Siska menyampaikan 560 orang data keanggotaan DPR RI 2009-2014 berdasarkan hasil pemilu 2009 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Fraksi partai Demokrat (FPD) 148 orang atau 26,42%, Fraksi Partai Golkar (FPG) 106 orang atau 18,92%, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 94 orang atau16,78%, Fraksi Partai keadilan Sejahtera (FPKS) 57 orang atau 10,17%, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) 46 orang atau 8,21%, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) 38 orang atau 6,78%, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 28 orang atau 5%, Fraksi Gerindra 26 orang atau 4,64%, Fraksi Gerindra 17 orang atau 3,04%. (as)

Usulan Amandemen Kelima UUD 45 Jangan Ubah Sistem Presidensial

Jurnal MPR (03/10). Mantan Ketua DPR periode 2004-2009 Agung Laksono mengharapkan, usul dan pemikiran untuk amandemen kelima UUD 1945 jangan sampai mengubah prinsip sistem presidensial, yang kita anggap sudah tepat, sesuai dengan jiwa dan semangat konstitusi kita.

Menurut Agung Laksono, sudah waktunya kita mengkaji secara jernih dan meninjau kembali terhadap perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan dalam kurun waktu satu dasawarsa ini.

Perubahan ini apabila dilaksanakan harus dilakukan secara terbatas dan terukur kepada pasal-pasal UUD 1945 untuk dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir potensi sengketa antarlembaga negara, mengatur kewenangan masing-masing lembaga negara, tidak tumpang tindih.

Dia mengakui, amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan memang masih banyak kekurangan dan kelemahan, seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. "Diperlukan kajian mendalam dan penelaahan kembali," tuturnya.

Dikatakan Agung Laksono, kita sangat memahami bahwa empat tahap amandemen UUD 1945 telah menerapkan sistem dan format ketatanegaraan baru. Amandemen atau Perubahan UUD 1945 tersebut telah membawa perubahan dan pergeseran terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada menjadi bersifat horizontal-fungsional serta menambah lembaga-lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY).

Secara tidak langsung, lanjut politisi Partai Golkar ini mengatakan, komisi-komisi negara sebagai lembaga quasi negara berdasarkan UU, jumlahnya menjadi sangat banyak dan beragam. Selama satu dasawarsa reformasi, kita juga menyaksikan dan mengalami suasana baru dalam hubungan antar lembaga negara yang dapat berpotensi menimbulkan sengketa pendapat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Bahkan tidak jarang sambung Agung, kita menyaksikan adanya kecenderungan *mal-function* atau *dis-function* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sering kali terjadi satu permasalahan bangsa ditangani oleh banyak lembaga atau komisi negara.

Di saat yang sama, ada banyak permasalahan bangsa dan negara yang sangat mendesak, tetapi tidak ada lembaga yang merasa memiliki kewenangan untuk menanganinya.

Sementara itu, kita juga merasakan adanya mata rantai yang tidak sinkron dan sinergis antara pemerintahan pusat dan daerah yang berlapis-lapis, yang kesemuanya dipimpin oleh kepala pemerintahan dan kepala daerah yang mengklaim mendapatkan mandat dari rakyat melalui sistem pemilihan langsung.

Masing-masing memiliki visi dan misi yang secara vertikal tidak saling berhubungan, yang telah ditawarkan dalam kampanye, baik pemilu maupun pilkada. Akibatnya, ada program-program dan langkah-langkah yang tidak sejalan, yang tidak sistemik menuju cita-cita proklamasi mewujudkan kesejahteraan rakyat. (mp)

Jadi Lokomotif Perbaikan Citra

Jurnal MPR (03/10). Seluruh fraksi DPR beri apresiasi terhadap pimpinan DPR terpilih periode 2009 – 2014. Di bawah kepemimpinan mereka diharapkan mampu menjalankan tugas secara baik dan bijak, serta menjalankan tugas dengan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi sesuai apresiasi rakyat.

Hal itu terungkap saat rapat pemilihan pimpinan DPR yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara Priyo Budi Santoso dari Fraksi Golkar didampingi Marzuki Alie dari Fraksi Demokrat, di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis malam (1/10).

Adapun susunan pimpinan DPR periode 2009 – 2014 adalah: Marzuki Alie sebagai Ketua DPR didampingi 4 orang wakil ketua, yakni Priyo Budi Santoso (F-PG), Pramono Anung (F-PDI Perjuangan), Anis Matta (F-PKS), dan Marwoto Mitrohardjono (F-PAN).

Berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), ketua terpilih berasal dari partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR. Sementara Wakil Ketua DPR dipilih berdasarkan nomor urut terbanyak berikutnya.

Juru bicara Fraksi Demokrat berharap, pimpinan DPR terpilih dapat kembangkan komunikasi antarpartai secara efektif. Lalu, menyosialisasikan dan mengaktualisasi keputusan strategis yang telah dilakukan setiap fraksi.

"Hasil keputusan diharapkan mampu mencerminkan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewibawaan dan mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya," katanya. Juru bicara Partai Golkar menilai, nama-nama yang diajukan setiap partai memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memimpin.

Kehadiran pimpinan DPR yang diajukan dapat meningkatkan fungsi-fungsi lembaga DPR melalui mekanisme dan meningkatkan tupoksi Dewan. "Pimpinan DPR diharapkan mampu sebagai lokomotif dalam membawa citra positif DPR di mata masyarakat," ujar Tjahjo Kumolo, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan,

Ia optimistis terhadap kelima tokoh pimpinan DPR. Ia pun merasa yakin, setiap partai politik punya keinginan sama untuk memakmurkan masyarakat. "DPR sebagai lembaga politik yang harus mengaspirasikan setiap denyut aspirasi masyarakat. Tingkatkan citra DPR sebagai anti korupsi," katanya juru bicara Fraksi PKS, Mustafa Kamal.

Dia berharap pimpinan DPR terpilih bisa mengoptimalkan kinerja dan bersungguh-sungguh membangun bangsa. "Pimpinan DPR adalah imam dan sebaiknya bisa meneladani semua anggota," tegas Ahmad Mumtaz Rais, jubir fraksi PAN.

Okky Asokawati, jubir Fraksi PPP, menilai pimpinan dewan memiliki tempat strategis sebagai garda terdepan menggerakkan komponen bangsa demi tercapainya kemajuan bangsa.

Sementara jubir Fraksi PKB, Marwan Jaffar, berharap pimpinan Dewan lebih berani. "DPR tidak boleh diintervensi oleh siapapun," tegasnya.

Menurutnya, banyaknya produk legislatif DPR yang bermasalah di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung saat ini merupakan bentuk kekurangan di bidang legislasi, terutama dalam pemahaman UUD 1945.

Rachel Maryam, jubir Fraksi Gerindra, berharap setiap partai politik mampu melepaskan keinginan pribadi politik demi kemajuan bersama. "Sama-sama membangun citra positif dari kualitas kinerja politik," katanya.

Sedangkan Fauzi Ahmad, jubir Fraksi Hanura, akan mendukung setiap putusan sepanjang berpihak kepada kepentingan rakyat. Apabila sebaliknya maka pihaknya akan kami kritisi dengan argumen yang keras. (da)

BATIK WARISAN BUDAYA INDONESIA

Jurnal MPR (03/10). Anggota MPR/DPR dari F-Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan bahwa ia merasa senang bahwa hari ini Jumat (2/10) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) yang terdiri dari 114 negara mengakui dan menetapkan batik sebagai warisan budaya milik Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Jero Wacik usai mengikuti pelantinkan anggota MPR di Gedung, Jakarta, Jumat (2/10). "Hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk ini pun dijadikan sebagai hari batik," katanya.

Berita gembira tersebut, menurut Jero Wacik, akan segera diumumkan secara resmi oleh Presiden atau melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ad-interm Muhammad Nuh.

Pengakuan dari Unesco itu, kata Jero Wacik, tidak sembarang, karena mereka juga mempertimbangkan bukti-bukti, seperti adanya masyarakat batik Indonesia, sejarah batik. "Dari situ dapat terlihat sejarah perkembangan batik di Indonesia," tandasnya.

Ketika ditanya wartawan mengenai pernyataan dari Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin yang mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari keputusan Unesco tersebut, Jero Wacik mempersilahkan Malaysia melakukan hal tersebut. "Kalau mau protes, silahkan protes ke Unesco," tegasnya.

Proses pengukuhan batik Indonesia cukup panjang. Berawal pada 3 September 2008 yang kemudian diterima secara resmi oleh UNESCO pada tanggal 9 Januari 2009. Tahap selanjutnya adalah pengujian tertutup oleh UNESCO di Paris pada 11 hingga 14 Mei 2009.

Kesuksesan batik diterima oleh UNESCO sebenarnya rangkaian dari kesuksesan sebelumnya, yakni tahun 2005 keris sudah diakui. Kemudian, lanjut dia, wayang kulit juga diakui tahun 2003, dan ini pertanda UNESCO memang mengakui hal-hal itu benar warisan budaya milik kita.

Angklung dan Gamelan Segera Menyusul

Seiring adanya pengakuan dan penetapan batik sebagai warisan budaya Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Demokrat Jero Wacik berharap, budaya Indonesia yang lain seperti angklung dan gamelan segera menyusul.

Menurut Jero Wacik, kedua budaya tersebut sedang diusulkan sebagai warisan budaya Indonesia dan kini masih dalam proses. Harapan ini dikemukakan Jero Wacik usai pengucapan sumpah sebagai Anggota MPR di Gedung Nusantara, Jumat (2/10).

Dikatakan Jero Wacik, setelah angklung dan gamelan, kita akan terus mengusulkan karya-karya atau budaya Indonesia berikutnya, dengan memilih karya-karya yang sudah menjadi karya nasional.

"Budaya-budaya Indonesia yang sudah membahayakan untuk diambil oleh bangsa lain, agar segera didaftarkan pada UNESCO," himbau mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Himbauan juga ditujukan Jero Wacik kepada seluruh lapisan masyarakat agar menunjukkan sikap dan rasa memiliki terhadap kebudayaan tersebut. Seperti batik misalnya. "Mari kita sering-sering memakai batik. Jangan hanya sekedar memperjuangkan supaya diakui, tapi setelah diakui malas memakainya,"ajak Jero Wacik.

Budaya lain yang juga telah ditetapkan menjadi warisan budaya Indonesia, yakni wayang dan keris. Untuk wayang, Jero menghimbau supaya masyarakat menonton acara tersebut. "Jangan kita sudah berjuang mati-matian tapi tidak pernah nonton wayang. Keris juga demikian, tidak ada salahnya kita mengkoleksi keris," katanya. "Karena itu warisan nenek moyang, untuk membuktikan bahwa ini semua budaya kita," tandas Jero Wacik. (nt/sw)

ANNA MU'AWANAH : Berikan Apresiasi Kepada UNESCO

Jurnal MPR (03/10). Dengan dikukuhkannya Batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia oleh UNESCO, Anggota DPR/ MPR dari Fraksi PKB Anna Mu'Awanah memberikan apresiasinya atas langkah tersebut.

"Pengukuhan itu merupakan terobosan yang luar biasa," tegas Anna usai mengikuti pelantikan Anggota MPR di Gedung DPR Jakarta, Jum'at (2/10)

Dengan diakuinya batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, setidaknya akan memberikan kesadaran tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang kurang menghargai kebudayaannya sendiri.

"Dengan adanya perlindungan dari UNESCO, setidaknya ada payung hukum yang lebih kuat bagi kelestarian warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia," kata Anna yang kembali terpilih sebagai Anggota DPR periode 2009-2014..

Anna menambahkan, nantinya perlu ada UU yang memuat perlindungan hukum terhadap budaya Indonesia. Hal ini perlu, agar semua pihak menyadari bahwa Indonesia mempunyai budaya yang sungguh luar biasa.

Terkait adanya pengakuan pemerintah Malaysia atas beberapa budaya Indonesia , menurut Anna hal itu boleh saja, namun yang harus diperhatikan adalah adanya sertifikasi bahwa budaya itu sudah menjadi milik Indonesia. "Jadi suatu saat kalau mereka mengkaim, kita katakan bahwa itu bagian dari duplikasi saja," jelasnya.

Adanya pengakuan dari UNESCO itu sudah merupakan suatu bukti bahwa kemenangan mutlak bagi bangsa Indonesia . Dan, jika ada instruksi dari instansi untuk pemakaian batik setiap hari Jum'at, ungkap Anna, boleh saja guna menumbuh kembangkan produk lokal serta menumbuhkan rasa memiliki.(sw)

Dedi "Miing" Gumelar Ingin Merformasi Birokrasi

Jurnal MPR (03/10). Wajahnya tampak sumringah ketika keluar dari ruangan Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR RI. Tubagus Dedi Suwendi Gumelar atau Dedi Gumelar atau lebih akrab dipanggil Miing baru saja selesai dilantik sebagai Anggota MPR RI periode 2009 – 2014.

Sebelumnya, Dedi Gumelar dikenal masyarakat dalam grup lawak Bagito. Dan di panggung ia dikenal sebagai tokoh Miing.

Kariernya berawal dari pengisi acara komedi di stasiun radio SK (Suara Kejayaan) pada tahun 1980-an bersama Bagito, dengan anggota tambahan Yanto (kemudian keluar dari Bagito). Sebelumnya, ia juga menjadi anggota tim kreatif *Warkop DKI*. Dalam sandiwara radio berdurasi dua jam Dedi berperan sebagai Pak RT ("Ketua RT"), Miing (seorang anggota Hansip), dan Ina (satu-satunya tokoh perempuan). Grup Bagito kemudian tampil di layar televisi dan meraih kepopuleran nasional. di sini hanya tokoh Miing yang dihidupkan dan kemudian menjadi *trade mark*-nya.

Keterlibatan Dedi dalam perpolitikan dimulai ketika ia menjadi anggota tim sukses pendirian Provinsi Banten, ketika Banten memisahkan diri dari Jawa Barat. Selanjutnya, dia masuk sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Ketika ditanyakan apa yang akan diperjuangkannya setelah menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten I? Dengan mantap dia menjawab, sebagai wakil rakyat dan juga wakil partai, selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan tujuan mulia partai politik.

Tujuan mulia itu adalah, bagaimana mengubah masyarakat yang tidak sejahtera menjadi sejahtera, dari yang tidak terdidik menjadi terdidik melalui perjuangan kebijakan dan anggaran. "Kebijakan dan anggaran ini harus selalu berpihak pada rakyat," katanya.

Selama ini, Miing melihat kebijakan dan anggaran belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Hal ini terbukti dengan tingginya angka kemiskinan, begitu juga dengan angka pengangguran. Ini berarti, katanya, secara nyata sebagai indikator bahwa kebijakan yang dibuat saat itu belum berpihak pada masyarakat.

Sebagai contoh manajemen bencana alam kita masih belum beres. Kalau untuk urusan Perbankan saja dana yang dikucurkan dapat mencapai triliunan, tapi untuk urusan bencana yang terjadi di Pengalengan sampai sekarang masih ada yang belum tersentuh.

Padahal dalam tahun 2009 ini saja berapa banyak terjadi bencana alam. Dan terakhir, baru saja terjadi di Sumatera Barat yang memakan banyak korban. Itu membuktikan bahwa kita dalam hal ini belum mampu mensejahterakan rakyat secara baik dan optimal sesuai dengan amanat UUD 1945 .

Untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, Miing berminat masuk di Komisi Pemerintahan (dulu Komisi II). Dia tertarik masuk ke bidang tersebut karena ingin mencoba memperbaiki birokrasi.

Dan, ada satu hal lagi yang menjadi angan-angannya adalah kita harus merevisi dan mengkritisi otonomi daerah yang selama ini banyak dipermasalahkan. Menurut Dedi Gumelar, dari 225 kabupaten/kota pemekaran hanya 20% dianggap berhasil, dan sisanya 80% dianggap gagal. Ini berarti pemekaran itu perlu ditinjau kembali," ujarnya. (Tuti)

Ikang Fawzi Berharap Ada Perubahan

Jurnal MPR (03/10). Musisi Ikang Fawzi berharap ada perubahan yang dilakukan rekan-rekan artis yang kini menjadi anggota dewan. Bila dulu selalu dilayani, sekarang harus siap melayani. "Aku sangat berharap teman-teman siap melakukan perubahan mendasar dan melakukan pekerjaan untuk bangsa. Demikian disampaikan suami Marissa Haque itu kepada Jurnal MPR, Jumat malam.

Ikang mengapresiasi para anggota dewan termasuk para artis yang tanggap terhadap penderitaan masyarakat di Sumatera Barat yang sedang ditimpa musibah. Seperti diketahui, banyak anggota dewan yang ingin menyumbangkan gaji pertamanya untuk masyarakat Sumbar. Menurut Ikang, itu bentuk kepedulian yang baik di saat mereka juga sedang dilantik. "Untung mereka tanggap," katanya, singkat.

Walau tidak terpilih sebagai anggota dewan, Ikang mengaku tidak kecewa. Pengusaha properti ini, pernah bertarung pada Pemilu lalu sebagai caleg di dapil Banten I (Pandeglang dan Rangkas). "Kalau KPU mengikuti arahan MK, saya dan Marissa masuk jadi anggota dewan. Tapi, karena pake cara-cara sendiri, ya mau enggak mau begitulah," ungkap ayah 2 anak itu.

Ikang menegaskan, keterlibatannya dalam dunia politik betul-betul untuk memberikan kontribusi bagi bangsa, tanpa pamrih. Namun, harus diakui kekuasaan dan uang masih mewarnai dunia politik kita. "Yang mendulang suara di dapil itu, ternyata pejabat, anak pejabat, dan saudara pejabat."

Lima tahun yang akan datang, Ikang mengaku, masih ingin terjun ke dunia politik. Ia punya jaringan politik yag tetap berjalan, walau tidak berkiprah di parlemen. Saat ini, katanya, demokrasi belum berjalan baik dan bangsa Indonesia masih terpukul.(sen)

Emir Moeis (F-PDIP) Yang Tua Membina Yang Muda

Jurnal MPR (03/10). Emir Moeis politisi senior PDIP ini kembali melenggang untuk ketiga kali masa jabatan MPR/DPR. Kepada Jurnal MPR Emir Moeis menjelaskan bahwa ini adalah betul-betul tantangan karena rakyat masih mempercayainya memegang amanah. Emir Moeis mengaku sebisa mungkin akan berjuang betul-betul menyempurnakan sesuatu yang sudah dikerjakannya untuk rakyat.

"Ini masa ketiga saya. Visi saya sudah tajam, saya akan manfaatkan betul masa berkarya saya dalam dua periode lalu. Mudah-mudahan pengalaman saya dapat menambah

dan mewarnai kinerja legislatif periode sekarang,"jelas Emir.

Emir menambahkan, banyak anggota legislatif yang sekarang sangat muda-muda dan masih baru. Dengan pengalaman yang ada, Emir akan memberikan curahan pengalamannya berkecimpung di dunia politik. "Saya akan berusaha lebih berperan dalam masa kinerja sekarang dengan memaksimalkan potensi diri saya, dan dengan senang hati ingin membina anggota yang muda-muda dan baru-baru sehingga bersama-sama kita melakukan agenda kerja legislatif untuk rakyat dan bangsa," tandas Emir optimistis.

Ketika ditanya tentang kandidat Ketua MPR RI, Emir menjelaskan, sesuai keputusan partai dan juga individu ia mendukung Bapak Taufiq Kiemas sebagai calon Ketua MPR RI. "Kami optimistis, intinya kita berjuang untuk itu. Semuanya kan untuk kepentingan bersama," ungkap Emir. (Derry Irawan)

Sutan Bhatoegana (F-PD) Taufik Kiemas Memang Sudah Saatnya Muncul

Jurnal (03/10). Ditemui usai Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR RI kemarin (02/10), Sutan Bhatoegena politisi dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa sidang-sidang MPR kali ini cukup baik dibanding lima tahun lalu.

"Lebih elegan tanpa ribut-ribut bisa menyelesaikan suatu masalah, Substansi masalah bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Jadi janganlah terlalu *show off* masalah politisnya saja, interupsi sana-sini..tidak perlu itu yang penting yang urgensi dibahas ada permasalahan apa yang sedang diperjuangkan rakyat saat ini dan ke depan itulah yang harus dibahas serius," pungkasnya.

Sutan mengambil contoh pada Sidang Paripurna dibahas tentang musibah gempa di Sumatera Barat dan himbauan untuk menyumbang kepada korban musibah disana. "Dan ternyata responnya positif hari ini (02/10) kita berhasil mengumpulkan sumbangan sebesar Rp.2,5 Juta per-anggota. Hitung saja ada sekitar 148 orang yang menyumbang, dan hari itu juga kita kirim ke korban bencana. Itu dari kesatuan fraksi. Mungkin ada masing-masing individu memberi sumbangan secara pribadi, siapa tahu," ujar Sutan.

Berbicara tentang kandidat Ketua MPR RI versi Partai Demokrat, ia menampik jika partainya menjagokan Taufiq Kiemas. "Demokrat tidak mencalonkan namun ada baiknya Ketua MPR itu berotasi dari fraksi lain, kebetulan PDIP mencalonkan Taufiq Kiemas politisi seniornya. Saya kira sudah saatnya dia muncul di pentas. Dia kredibel. Semua yang sudah masuk Senayan itu adalah orang-orang yang kredibel, tak terkecuali Pak Taufik, tinggal bagaimana nanti menjalankan amanah ini. Orangnya pantas, punya pengalaman politik, maka tinggal menjalankan komitmen," tandasnya. (Derry Irawan)

Anis Matta (F-PKS) Penguatan Lembaga Legislatif Perlu

Jurnal MPR (03/10). Tugas seorang anggota MPR/DPR RI tidak main-main, setidaknya harus ada persiapan matang dan agenda kerja yang jelas bagi masing-masing anggota terpilih. Hal ini diamini oleh Annis Matta dari F-PKS. Menurut Anis, kinerja legislatif yang lalu sudah bagus tapi perlu peningkatan kinerja pada masa jabatan sekarang.

"Saya sendiri sudah masuk dua periode keanggotan di DPR. Tugas berat yang menghadang ke depan adalah melanjutkan reformasi yang sudah berjalan, terutama penguatan lembaga legislatif ini dan perlu peningkatan kinerja, misalnya dalam aspek legislasinya, kemudian penajaman pada strategi anggaran sehingga sesuai peruntukannya," jelasnya. (Derry Irawan)

Ahmad Mumtaz Rais (F-PAN) Saya Bangga Termasuk Yang Muda

Jurnal MPR (03/10). Hampir 70% anggota baru MPR/DPR RI adalah generasi muda. Tak heran jika kalangan muda terlihat menyebar di sidang-sidang. Tak terkecuali Ahmad Mumtaz Rais. Ketika ditemui *Jurnal MPR* Jumat (02/10), Mumtaz merasa terhormat bisa satu deretan dengan para politisi muda.

"Bukan berarti saya tidak menghargai yang tua, mereka adalah guru kita dan harus kita pelajari pengalamannya. Intinya saya senang dan saya siap mengabdi untuk bangsa dan negara, insya Allah saya pasti memegang amanat rakyat dan akan melaksanakan agenda kerja saya dan akan menjalankannya sesuai fungsi dan wewenang sebagai anggota MPR/DPR RI," ucap anak politisi kharismatik yang juga mantan ketua MPR RI, Dr. Amien Rais ini.

Lebih jauh Mumtaz melihat sebagian anggota MPR/DPR RI ini sangat kredibel karena banyak dari kalangan teknokrat, ekonom dan ahli di bidang ilmu lainnya. "Ini menjadi pemicu saya untuk terus berkompetisi yang sehat dengan mereka jangan sampai saya tertinggal nanti, maka saya terus menerus mengasah seluruh kemampuan saya sehingga ketika tugas dari rakyat sampai, saya akan bekerja optimal yang pada akhirnya semuanya akan kembali bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar laki-laki berusia 26 tahun ini. (Derry Irawan)

Alotnya Pemilihan Ketua DPD

Jurnal MPR (3/09). Alotnya pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung Kamis (1/10) karena harus memilih ketua yang mewakili aspirasi rakyat daerah di seluruh wilayah. Misalnya dalam pasal 25 ketentuan pemilihan ketua disebutkan, ketua harus mencerminkan keterwakilan kepulauan dan keterwakilan wilayah.

Ada 16 calon yang diajukan DPD kemarin (Kamis, 1/10). Irman Gusman, Sultan B. Najamudin, Farhan Hamid, Bambang B.Soeroso (Sumatera), GKR Hemas, AM Fatwa, Dani Anwar, Poppy Dharsono (Jawa), Sofwat Hadi (Kalimantan), Farouk Muhamad (Bali-NTB), Azis Kahar Muzakar, La Ode Ida, Aryanti Baramuli Puteri (Sulawesi), Ana Latuconsina dan Abdurahman Lahabato (Maluku), Ishak Mandacan (Papua). Dari ke-16 calon ketua itu kemudian mengerucut menjadi tiga calon yaitu Irman Gusman, La Ode Ida dan GKR Hemas.

Dalam ketentuan disebutkan pula bahwa pimpinan DPD adalah satu kesatuan. Meski berasal dari wilayah dan kepulauan berbeda tetap harus mencerminkan semangat persatuan. Itulah yang menyebabkan pemilihan ketua DPD berjalan alot dan penuh dengan interupsi. Tapi semua berjalan damai.(Iman Firdaus)

Aksi Sniper

Setiap kali presiden dan wakil presiden bertandang ke MPR/DPR, selalu ada sniper yang berjaga-jaga dan mengintai dari ketinggian gedung. Para sniper ini, biasa mengintai dari lantai 10, Nusantara III. Inilah, sisi lain dari perhelatan Sidang Umum.

Berbaju serba hitam dengan persenjataan lengkap dan canggih, mereka sudah berjaga-jaga sejak pagi hari,

beberapa jam sebelum presiden dan wakil presiden tiba di Gedung MPR/DPR. Dari topi yang dikenakannya, tertulis Paspampres. Mereka kerap berpatroli dari ketinggian gedung. Sesekali mengintai dengan teropong, melihat keremunan orang-orang yang berlalu lalang di bawah.

Di sela-sela tugas, para seniper kerap mampir ke ruang media visual (Medvis) MPR, sekadar untuk berbincang-bincang dan *ngopi* bareng dengan para staf di sana.

Mereka berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ternyata, mereka tetap ramah, bahkan gelak tawa mewarnai obralan di lantai 10. Tak ada kesan menakutkan atau garang.

Sesekali senjata yang dibawanya diperlihatkan. Sebuah sangkur atau pisau yang biasa digunakan militer diperkenalkan. Alat teropong tak ketinggalan diperlihatkan pula. Tampak canggih dan kuat. Setelah presiden dan wakil presiden meninggalkan gedung MPR/DPR, mereka belum segera beranjak sebelum benar-benar aman. Dengan tas besar, semua perlengkapan sniper dikemas, lalu berpamitan pulang pada semua staf Medvis.(sen)

Nitip Interupsi Buat Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD dalam Pengambilan Sumpah/janji Anggota MPR RI 2009-2014 di Gedung Nusantara, MPR/DPR, Jakarta, Jumat (2/10) ternyata dimanfaatkan untuk menumpahkan uneg-uneg oleh salah satu anggota dewan. Panda Nababan, anggota DPR dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan interupsi sesaat setelah pengucapan sumpah/janji selesai.

"Saya meminta supaya Ketua Mahkamah Konstitusi tidak mengomentari hal-hal di luar kasus yang ditanganinya. Seperti meminta mencopot polisi, dan sebagainya," kata Panda di sela-sela sidang. Lalu, oleh Ketua MPR Sementara Marzuki Alie, yang memimpin jalannya sidang, interupsi itu hanya ditanggapi akan ditampung.

Kepada Jurnal Sidang MPR RI seusai sidang, Panda mengaku interupsi dilakukan untuk mengingatkan MK supaya tahu posisinya secara konstitusional. "Jadi ketua MK itu jangan ngomongin yang di luar (kasus) dia. Dia kan ngomong minta copot polisi, minta copot itu, dsb," ujarnya.

Ketika ditanya kenapa interupsi dilakukan di sela-sela pengambilan sumpah/janji anggota MPR, Panda berpendapat, justru kesempatan ini paling baik untuk menyampaikan karena dihadiri Ketua MK dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kita kasih tahu kepada ketua MK untuk tidak dengan mudah berbicara. Dia kan ngomong supaya hakim jangan ngomong. Kalau pun ngomong yang dibicarakan kasus yang dia tangani,"ungkap Panda.

Panda berdalih, interupsi dilakukan setelah pengambilan sumpah/janji selesai. Yaitu pada saat ada kesempatan untuk berbicara. "Itu bukan pesan saya pribadi tetapi DPR periode lalu. Di dalam pidato penutupan, Ketua DPR Agung Laksono menyampaikan pesan supaya pemerintah jangan melakukan hal seperti itu,"jelasnya.

Selain itu, menurut Panda, Ketua MK atau hakim konstitusi secara konstitusional tidak mengomentari di luar hal-hal dari pekerjaan dia. "Hakim itu lebih banyak diam. Kok malah jadi seperti *politician*. Itu kan sudah salah kaprah," tandasnya. (Rini S. Danudjaja).

Gandung Pardiman, Bintang Interupsi

Jurnal MPR (03/10). Detik-detik acara pelantikan anggota MPR RI Periode 2009-2014, Jumat (2/10), berlangsung khidmat. Rangkaian demi rangkaian acara berlangsung secara normal, namun begitu acara serah terima dari pimpinan MPR Periode 2004-2009 ke pimpinan MPR sementara 2009-2014, suasana secara tiba-tiba berubah. Seorang anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar dari Dapil Jogjakarta, Gandung Pardiman, melakukan interupsi.

Meski interupsi tidak ditanggapi oleh pimpinan sidang, tetapi ia tetap memohon agar interupsinya diterima. Rupanya Marzuki Alie tetap bersikukuh tidak menerima keinginan mantan Wakil Ketua DPRD I Jogjakarta itu. Akhirnya acara serah terima pun berlangsung dengan mulus.

Begitu, serah terima selesai dan pimpinan MPR periode sebelumnya kembali ke tempat duduknya, Gandung pun melakukan interupsi kembali. Entah karena suaranya lantang dan ngotot untuk mengeluarkan pendapat, interupsi itu akhirnya diterima. "Bapak pimpinan sidang, tolong dijelaskan mengapa dalam rapat-rapat paripurna maupun saat pelantikan anggota DPR/DPD/MPR periode 2009-2014, Presiden tidak pernah hadir," ujarnya.

Pertanyaan itu rupanya menimbulkan suasana sidang sedikit menjadi tegang, anggota MPR lainnya pun saling berbisik menyikapi interupsi itu. Untung Marzuki Alie segera menjawab mengapa presiden selalu absen dalam pergantian masa jabatan MPR/DPR/DPD ini. Dikatakan presiden tidak hadir karena sedang meninjau gempa di Sumatera Barat.

Rupanya interupsi itu memancing anggota MPR lainnya untuk melakukan hal yang sama. Karena jawaban yang diberikan kurang memuaskan, Gandung Pardiman pun melakukan interupsi lagi. Namun kali ini interupsi tidak dilayani. Mantan guru di Kabupaten Gunung Kidul itu pun terus berteriak-teriak agar pemimpin sidang memberi ketegasan, apakah interupsinya ditolak atau diterima.

Melihat hal seperti ini, diantara anggota MPR, para wartawan, undangan lain, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla, ada yang merasa terhibur, meneriaki, atau tersenyum saja. Ketika ada sebagaian anggota MPR yang bersama-sama mengatakan, interupsi ditolak, Gandung pun menjawab dengan lantang, "Anda bukan pemimpin sidang, posisi Anda sama seperti saya." Mendengar kalimat itu semuanya tertawa.

Pria yang berhasil menuju ke Senayan dengan 75.374 suara itu ketika ditemui Jurnal MPR mengatakan merasa sedih karena presiden tidak memiliki manajemen waktu. "Saya sedih saja karena manajemen waktu itu penting bagi seorang presiden," kata Ketua Kodrat (Keluarga Olahraga Tarung Derajat) Jogjakarta itu.

Menurut Gandung, presiden penting untuk hadir dalam acara seperti ini. "Bagaimana nanti kalau saat pelantikan ganti anggota MPR yang tidak hadir?" katanya. Lebih lanjut dikatakan sebagai anggota legislatif mempunyai hak untuk menilai dan mengawasi presiden. "Presiden yang diawasi kelihatan cuek, ini kan nggak bener," ucapnya.

Saat pelantikan anggota MPR pria yang menjadi korlap mendukung keistimewaan Jogjakarta itu seolah-olah menjadi bintang pada waktu itu. Lalu bila sebagai anggota legeslatif, komisi apa yang diinginkan. Ia mengatakan, akan mengambil komisi yang terkait dengan masalah hukum. Alasannya? "Hukum kita sekarang rusak," ucapnya. *(Ardi Winangun)*

Mervin Sadipun Komber

Jurnal MPR (03/10). Pembangunan di Papua Barat selama ini dirasa kurang maksimal sehingga rakyat di provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua ini masih belum sejahtera. Berangkat dari keprihatinannya itu, seorang putra asli Papua Barat bernama Mervin Sadipun Komber memberanikan diri untuk memperjuangkan daerahnya melalui DPD. Usaha dan keinginan Mervin itu rupanya didukung oleh masyarakat. Sehingga ia terpilih sebagai anggota DPD dari Papua Barat.

Selepas pelantikan anggota MPR RI Periode 2009-2014, Kamis, (01/9), kepada *Jurnal MPR* ia menyatakan bahwa saatnya kita yang berada di MPR untuk bersama-sama memikirkan persoalan bangsa, terutama perkembangan daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh.

Menurutnya, selama pembangunan yang terjadi di Papua Barat hanya dititikberatkan pada masalah uang dan tidak adanya kepastian konsep pembangunan. Hal ini bisa terjadi karena UU Otonomi Khusus yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik. Untuk itu ia mengharap agar otonomi khusus dilaksanakan secara konsekwen.

Dengan otonomi khusus itulah Papua Barat diharapkan bisa seperti daerah-daerah lainnya. Cita-cita Mervin adalah membuat peta jalan di provinsi itu. "Pembangunan di Papua Barat tertinggal makanya saya mengharapkan adanya peta jalan yang disusun oleh orang Papua sendiri. Karena orang Papua sendirilah yang mengerti soal Papua," ujarnya. Di bidang politik, Mervin ingin hadirnya partai lokal seperti yang ada di Nangroe Aceh Darussalam.

Keinginan itu menurutnya tidak membuat disintegrasi bangsa. "Disintegrasi? O tidak, justru itu memperkuat kedudukan kita sebagai anak bangsa," ujarnya. Hal itu juga dirasa tidak akan menimbulkan kecemburuan. "Di Aceh kan ada partai politik lokal, masak di Papua Barat tidak bisa. Pemerintah bisa duduk bersama dengan orang Aceh tetapi kenapa dengan orang Papua tidak bisa?," ujarnya.

Untuk menempuh langkah-langkah tersebut, Mervin mengajukan gagasan dengan mengadakan dialog secara keseluruhan untuk merencanakan proses pembangunan yang lebih baik untuk Papua, terutama untuk pelaksanaan otonomi khusus. "Disitulah nanti kita akan membicarakan berbagai masalah untuk pembangunan Papua Barat," katanya.*(Ardi Winangun)*